

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi sektor publik yaitu salah satu instansi pemerintah yang mempunyai tugas membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum berupa pelayanan baik itu dalam bidang pendidikan, transportasi, kesehatan, jasa pelayanan publik, keamanan, kepastian hukum dan lain sebagainya. Pemerintah ditingkat daerah memiliki peran yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat dalam kualitas jasa yang menjadi pusat layanan bagi masyarakat (Pambudi & Hidayat, 2022). Setiap instansi pemerintah tentunya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk merealisasikan tujuannya, nantinya dana anggaran tersebut diharapkan juga sesuai dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sehingga manfaatnya juga dapat dirasakan oleh masyarakat. Sebagaimana didasari oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola dengan tertib, taat pada aturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab serta memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat masyarakat yang dilaksanakan dalam suatu sistem terintegritas yang diwujudkan dalam anggaran.

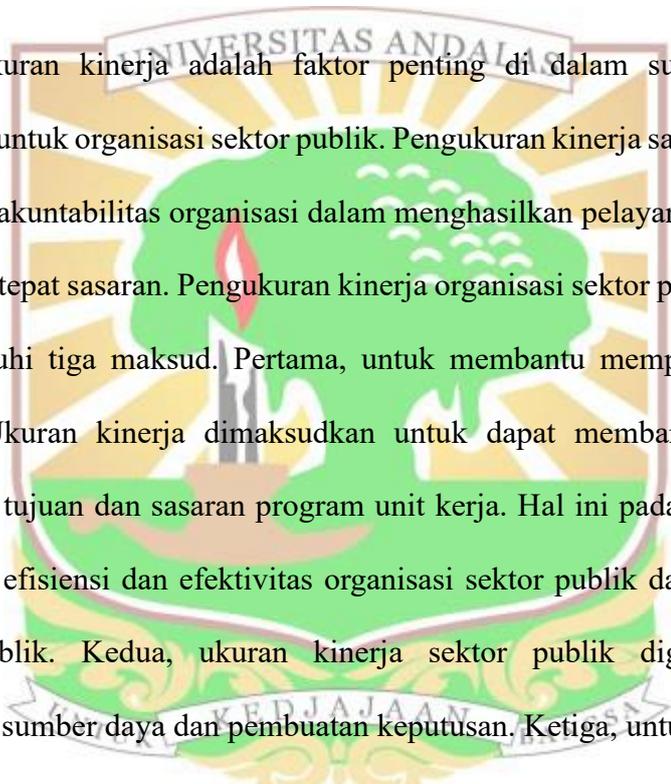
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu pilar dalam perencanaan pembangunan bagi pemerintah daerah. Dari perencanaan pembangunan ini pemerintah daerah berupaya melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya perencanaan APBD. Pengelolaan APBD

yang baik harus memperhatikan kepentingan publik maka realisasi dan pengalokasian dana terhadap program-program maupun berbagai kegiatan yang dibiayai akan memberikan manfaat yang besar sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan publik akan pelayanan pemerintah yang berorientasi pada kepentingan publik. Akan tetapi dalam perkembangannya masih terdapat permasalahan dalam sistem pengelolaan terhadap APBD.

Saat ini masyarakat semakin kritis dan mempertanyakan manfaat yang mereka dapatkan dari pelayanan instansi pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan administrasi pemerintah. Tuntutan tersebut sesuai dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 pasal 23 ayat (2) tentang pemerintah daerah, yang digunakan sebagai dasar bagi serangkaian reformasi kelembagaan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, ekonomis, efektif, transparan, responsif, dan akuntabel. Pemerintahan yang baik akan dapat tercapai apabila para aparat pemerintah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Akuntabilitas publik sesuai dengan karakteristik pelaksanaan *good governance* yang diberikan oleh *United Nation Development Program* (UNDP) dalam Mardiasmo (2009), meliputi partisipasi (*participation*), penegakan hukum (*rule of law*), transparansi (*transparency*), daya tanggap (*responsiveness*), orientasi kepentingan umum (*consensus orientation*), kesetaraan (*equity*), efisiensi dan efektivitas (*efficiency and effectiviness*), akuntabilitas (*accountability*), dan visi ke depan (*strategic vision*). Dalam konteks organisasi pemerintahan, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi kepada publik dan konstituen lainnya yang

menjadi pemangku kepentingan (*stakeholder*) (Mahmudi, 2016). Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Akuntabilitas publik juga terkait dengan kewajiban untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengenai apa yang telah, sedang, dan direncanakan akan dilaksanakan organisasi publik.



Pengukuran kinerja adalah faktor penting di dalam suatu organisasi, termasuk juga untuk organisasi sektor publik. Pengukuran kinerja sangat diperlukan untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan tepat sasaran. Pengukuran kinerja organisasi sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2009)

Pengukuran kinerja juga merupakan salah satu faktor penting dalam pengimplementasian manajemen strategis. Hal ini penting karena pengukuran kinerja merupakan salah satu tahapan dalam siklus manajemen strategis. Dengan memahami siklus manajemen strategis tersebut dapat diketahui bahwa pengukuran kinerja merupakan tahapan yang sangat vital bagi keberhasilan implementasi

manajemen strategis. Rencana strategis yang telah ditetapkan oleh organisasi membutuhkan wahana untuk mewujudkannya dalam bentuk aktivitas keseharian organisasi. Implementasi rencana strategis akan dapat mencapai kualitas yang diinginkan jika ditunjang oleh pola pengukuran kinerja yang berada dalam koridor manajemen strategis. Hasil pengukuran kinerja sektor publik harus dilaporkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban kinerja. Pembuatan laporan tersebut merupakan manifestasi dilakukannya akuntabilitas publik (Mahmudi, 2016). Kinerja organisasi sektor publik bersifat multidimensional, sehingga tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja secara komprehensif. Berbeda dengan sektor swasta, karena sifat *output* yang dihasilkan organisasi sektor publik lebih banyak bersifat *intangibile output*, maka ukuran finansial saja tidak cukup untuk mengukur kinerja organisasi sektor publik. Oleh karena itu, perlu dikembangkan ukuran kinerja non-finansial.

Dalam rangka memperoleh hasil pengukuran yang objektif dan menyeluruh mencakup aspek yang bersifat *tangible* maupun *intangibile* maka metode pengukuran kinerja harus didesain sedemikian rupa agar bisa representatif selain juga *applicable*. Ada beberapa alat dalam pengukuran kinerja, antara lain menggunakan metode *Balance Score Card* dan metode *Value for Money*. Dalam metode *Balance Score Card* terdapat empat perspektif yang dinilai yaitu perspektif keuangan (*financial*), perspektif konsumen (*customer*), perspektif proses bisnis/intern (*internal*), dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 4 (*growth and learn*), sedangkan dengan metode *Value for Money* terdapat tiga elemen utama yang dinilai yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Salah satu cara untuk mengukur kinerja lembaga sektor publik adalah dengan menggunakan pendekatan *value for money*. *Value for Money* adalah sebuah konsep yang mengatur organisasi sektor publik berdasarkan tiga faktor utama: ekonomi, efisiensi dan efektivitas (Mardiasmo, 2018). Pengadaan dan alokasi sumber daya yang hemat, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti meminimalkan penggunaan sumber daya dan memaksimalkan hasil, dan mencapai tujuan dengan efektif. Pendekatan *value for money* untuk pengukuran kinerja dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah untuk menerapkan mekanisme manajemen pemerintahannya yang mengandalkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan yang baik. Masyarakat membutuhkan pelayanan publik yang baik, keseimbangan antara kekuasaan yang mereka miliki dan tanggung jawab (akuntabilitas) yang diberikan kepada mereka yang mereka layani. Birokrat dapat lebih efisien dan efektif melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan dan perlindungan masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk mencapai dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Model *value for money* atau yang dikenal dengan model 3E mengukur kinerja organisasi sektor publik dengan analisis membandingkan antara input dan output yang direncanakan dengan input dan output aktualnya. Ekonomi diukur melalui rasio antara masukan aktual dengan masukan rencana. Efisiensi diukur melalui rasio efisiensi aktual dengan rasio efisiensi yang direncanakan. Efektivitas diukur dengan membandingkan keluaran realisasian (aktual) dengan keluaran menurut rencana (Mardiasmo, 2018). *Value for money* dalam konteks otonomi daerah merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai

good governance. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik (*publik money*) yang mendasarkan konsep *value for money*, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang baik. Hal tersebut dapat tercapai apabila pemerintah daerah memiliki sistem akuntansi yang baik.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bukittinggi merupakan salah satu instansi pemerintahan daerah yang bertugas menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang ditunjukkan untuk masyarakat. BPBD Kota Bukittinggi Memiliki Visi yaitu “Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa Berlandaskan Nilai-Nilai Agama dan Budaya”. Dengan visi yang dimilikinya BPBD Kota Bukittinggi memiliki beberapa misi untuk mewujudkan visi tersebut serta tentu saja BPBD Kota Bukittinggi harus mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Subhan dkk., (2020) dengan judul Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dengan Menggunakan Prinsip *Value For Money* (Studi APBD Kabupaten Sumbawa) memberikan hasil bahwa kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa jika dilihat dari perekonomian pada tahun anggaran 2010 sampai dengan 2018 mengalami fluktuasi. Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Indrayani & Khairunnisa (2019) dengan judul Analisis Kinerja Dengan Menggunakan Konsep *Value For Money* pada Pemerintah Kota Lhokseumawe periode 2014- 2016) memberikan hasil bahwa rasio ekonomi dikategorikan ekonomis, rasio efisiensi dikategorikan efisien dan rasio efektifitas memperoleh kriteria tidak efisien. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Rahmawati (2019) dengan judul Pengukuran

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Dengan Menggunakan Metode *Value For Money* memberikan hasil bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo tercatat memiliki rasio ekonomis yang tidak stabil namun tetap ekonomis, tingkat efisiensi yang baik dengan angka tidak mencapai 100% dan efektifitasnya mencapai lebih dari 100%.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai *value for money* anggaran belanja pada Badan Penanggulangan Bencana di Kota Bukittinggi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini adalah

1. Bagaimana kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi jika diukur dengan ekonomis?
2. Bagaimana kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi jika diukur dengan efisiensi?
3. Bagaimana kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi jika diukur dengan efektivitas?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi jika diukur dengan indikator ekonomis.
2. Untuk mengetahui bagaimana kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi jika diukur dengan indikator efisiensi.

3. Untuk mengetahui bagaimana kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi jika diukur dengan indikator efektivitas.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini berguna bagi penulis dalam penerapan ilmu yang telah dipelajari khususnya akuntansi sektor publik serta menambah pengetahuan penulis mengenai pengukuran kinerja pemerintah jika diukur dengan *value for money*.

2. Bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan *feedback* serta tambahan referensi dalam mengukur kinerja kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi guna melaksanakan program secara ekonomis, efisien, dan efektif di masa yang akan datang, serta memberikan alternatif masukan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya hasil peniltian ini dapat digunakan sebagai referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis.

1.5 Sistematika Penulisan

Pembahasan pada penelitian ini terbagi atas 5 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, mamfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teori

Pada bab ini berisi pembahasan mengenai berbagai teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, penelitian terdahulu serta kerangka berfikir.

BAB III: Metode Penelitian

Pada bab ini memberikan bagaimana penelitian ini akan dilaksanakan. Bab ini menguranikan tentang desain penelitian, tempat dan waktu penelitian, dan metode analisis data

BAB IV: Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian serta hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V: Penutup

Pada bab ini membahas kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, batasan penelitian, serta saran untuk pihak yang memiliki kepentingan dengan penelitian ini.

